

Peace by Neighborhood:
**Rukun Tetangga sebagai Asosiasi Persatuan Kejiranan dan Potensi
Praktikalnya terhadap Hubungan Antar Etnik di Malaysia dan Indonesia**

Oleh: Afriva Khaidir

ABSTRACT

Ethnic relation, particularly between the Malay as indigenous people and the Chinese in some Southeast Asia countries, is one of the most important aspects in an effort to compose a nation. Focusing on discourse of the role of social organization in maintaining peace in society, a research has conducted in Alor Setar, Malaysia and Padang, Indonesia, two cities with different colonial administration in the past, British and Dutch. A qualitative-quantitative research was conducted to explore the potencies of the neighborhood association in creating peace through ethnic relations between Malay and Chinese. The scheme facilitates contacts and engages people of community by various activities. Those performances in core activities have been evaluated positively by the citizens. Nevertheless, some social aspects became problematic in connecting the people through civic engagement of the ethnic groups. The management of the Rukun Tetangga in the two countries is also different. However, as a neighborhood association, Rukun Tetangga has eminent role in maintaining supportive social relationship between ethnic groups in a community.

Kata Kunci: *Rukun Tetangga, Hubungan antar Etnik, Perpaduan, Konflik, Kejiranan*

I. PENDAHULUAN

Rukun Tetangga di Indonesia merupakan aplikasi dari konsep persatuan kejiranan. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*neighborhood association*”. Sedangkan sebagian lagi menyebutnya sebagai “*urban locality groups*” atau “*urban commu-*

nity”¹. Karena Rukun Tetangga pada umumnya berada dalam lingkungan di

¹ Dwiyanto, Raphaella D. 2001. *The Existing Form of Urban Locality Groups in Jakarta: Reexamining the RT/RW in the post-New Order Era*. Atmajaya Catholic University Indonesia; Galster. C. 2001. “On the Nature of Neighborhood”. *Urban Studies*. volume 38: 12. page 2111-2124.

wilayah perkotaan, dan mewakili suatu persatuan setempat (*locality*) di wilayah perkotaan. Satu Rukun Tetangga terdiri dari beberapa (30 hingga 50) Kepala Keluarga/KK dan di Indonesia, satu Rukun Warga/RW terdiri dari beberapa (3 hingga 5 buah) Rukun Tetangga (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 tahun 2002).

Dwiyanto² berpendapat bahwa sebagai persatuan kejuranan, Rukun Tetangga diberikan tugas dan fungsi oleh pemerintah untuk memajukan dan membantu proses integrasi di antara warga dan perhubungan antara warga dengan negara. Di samping itu, Rukun Tetangga secara komprehensif juga diharapkan mampu mengatur urusan-urusan harian di dalam komunitas. Oleh karena itu, Rukun Tetangga telah ditentukan tugas mereka oleh negara. Pendekatan melalui mekanisme “*top-down*” seperti ini pada masa Orde Baru adalah arus perdana bagi keberadaan Rukun Tetangga di Indonesia.

Gerakan Reformasi di Indonesia dimulai dengan krisis ekonomi pada tahun 1996 dan disusul dengan kejatuhan Presiden General Soeharto sebagai ikon regim Orde Baru. Situasi ini memberi begitu banyak perubahan dalam asas komunitas di Indonesia, terutama di

perkotaan-perkotaan besar. Secara nasional, keadaan berikutnya setelah tahun 1999 cenderung memberikan kebebasan yang lebih lebar kepada masyarakat sipil sekaligus melemahkan kekuasaan dari negara dalam mengendalikan kehidupan masyarakat. Sebagai dampak berikutnya, kolumnis N.D. Kristof³ dalam *New York Times* 25 Mei tahun 1998 berpendapat bahwa kebebasan baru di Indonesia memberi peluang kepada terjadinya perpecahan etnik. Perkotaan sebagai wilayah padat penduduk yang bersifat multi budaya sangat berpotensi terhadap pertikaian dan ketegangan etnik ini. Keadaan sosial yang jika tidak diurus dengan baik akan mencetuskan konflik bersifat etnik.

Menggunakan terminologi yang digunakan oleh Nurhadiantomo⁴ yang mengikuti pemikiran Ralf Dahrendorf, konflik sosial terdiri dari ‘konflik tersurat’ atau ‘konflik manifest’ dan ‘konflik tersirat’ atau ‘konflik laten’. Konflik tersirat sangat sulit untuk diungkapkan. Pada saat konflik manifest yang terjadi pada antara 13 hingga 15

³Kristof, Nicholas D. 1998. In Indonesia, New Freedom Feeds Ethnic Friction, *New York Times*, May 25, 1998.

⁴Nurhadiantomo. 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pro-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal: 1

² Dwiyanto, Raphaella D. 2001. *Op cit.* hal: 41.

Mei tahun 1997 di beberapa kota utama di Indonesia seperti Jakarta, Solo, Yogya termasuk Padang. Konflik ini menampilkan wujudnya kekerasan kolektif dalam bentuk kerusuhan dalam skala besar yang melibatkan korban termasuk komunitas Cina yang diakibatkan oleh tindakan ‘spontan’ kaum pribumi. Peristiwa ini berbentuk kerusuhan, pembakaran, mencuri harta benda, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya.

Tidak lama setelah kerusuhan itu, banyak orang Cina yang melarikan diri ke luar negeri. Menurut data dari pemerintah Indonesia yang kemungkinan angka sebenarnya lebih besar, jumlah warga negara Indonesia keturunan Cina meninggalkan Indonesia mencapai angka 80 ribu orang. Mereka adalah 1.5 persen dari penduduk Cina Indonesia yang berasal dari kelas menengah yang mempunyai kekuatan keuangan untuk lari ke luar negara⁵. Sebagian mereka mengalami trauma dan memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Indonesia. Meskipun banyak beranggapan mereka masih menjadi sebagian dari bangsa Indonesia, namun ada keraguan sama ada orang Indonesia asli akan dapat terus menerima

⁵Leo Suryadinata. 2003. “Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran negara, sejarah dan budaya dalam hubungan antaretnis”. *Antropologi Indonesia tahun xxvii no. 71*, Mei Agustus 2003. hal: 10

mereka sebagai anggota bangsa Indonesia ataupun tidak.

Persitiwa di atas merupakan gejala keruntuhan sosial (*social deprivation*). Ini sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya sistem sosial yang ada. Banyak kajian menunjukkan keadaan ini dan dimulai sejak saat lebih awal⁶. Namun demikian, ada juga yang menyimpulkan bahwa dalam sudut pandang legal formal dalam lima tahun terakhir tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi dan kebebasan fundamental etnik Cina di Indonesia di peringkat nasional maupun internasional sudah cukup memuaskan.

Sementara itu di wilayah jiran terdekat di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Rukun Tetangga juga mendapat tempat dalam kebijakan negara dalam membangun kehidupan sosial kemasyarakatan. Skim Rukun Tetangga yang diperkenalkan pada tahun 1975 pada mulanya bertujuan untuk meletakkan

⁶Masyhuri. 2006. *Bakar Pecinan Konflik Pribumi vs Cina di Kudus tahun 1918*. Jakarta: Pensil-234; Nurhadiantomo. 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pro-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta; Alo Liliweri. 2005. *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKSI

tanggungjawab bersama-sama untuk mempertahankan keselamatan dan kesejahteraan negara di bahu rakyat sendiri. Secara formal fungsi dan tanggungjawab Rukun Tetangga ini diatur dalam *Peraturan-Peraturan Perlu Rukun Tetangga 1975*. Tugas dan kewajiban ini mencakup juga: pendampingan sosial, peningkatan ekonomi dan berdikari, pendidikan dan memperkuat komunitas. Dalam Konvensyen Rukun Tetangga melalui kertas kerja Yahya Ibrahim⁷ dinyatakan bahwa Rukun Tetangga dibentuk untuk mengakselerasi dan memperlancar proses pemantapan kesatuan dan integrasi nasional. Oleh karena itu dirasakan penting untuk dikaji bagaimana korelasi dan orientasi skim Rukun Tetangga dalam pemikiran integrasi bangsa. Artinya skim Rukun Tetangga merupakan bentuk pengurusan komunitas dalam upaya penciptaan harmoni hubungan antara etnik di Malaysia.

II. KAJIAN TEORITIS

Perpaduan bangsa merupakan salah satu dari permasalahan yang senantiasa menjadi perhatian utama dari pemerintah negara Malaysia. Beberapa peneliti di Malaysia

⁷ Yahya Ibrahim. 1995. *Pemandaran dan Kejiranan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

menyimpulkan bahwa perpaduan di Malaysia masih belum bisa dikatakan mantap dan mungkin terdedah kepada ketegangan pada bila-bila masa. Shamsul Amri⁸, misalnya, mengistilahkan perpaduan di Malaysia sebagai berada dalam keadaan '*stable tension*'. Keadaan yang secara tersurat terlihat aman damai, namun secara tersirat wujud keadaan yang mengandungi ketegangan dan kecurigaan di antara kaum yang terbabit. Dalam sejarah Malaysia terdapat beberapa peristiwa penting yang senantiasa mengingatkan resiko yang terkandung dalam masalah kesatuan antara kaum ini. Diantara yang merupakan detik hitam ialah peristiwa 13 Mei 1969 yang menimbulkan kekacauan dari segi politik, ekonomi, sosial dan psikologi di kalangan masyarakat Malaysia.

Comber⁹ yang senada dengan Abraham¹⁰ menyimpulkan bahwa ini

⁸Shamsul Amri Baharuddin. 2005. "Making Sense of National Unity in Malaysia: 'Break-down' versus 'break out' Perspectives". In Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

⁹Comber, Leon. 1983. 13 May 1969: A Historical Survey fo Sino-Malay Relations. Kuala Lumpur: Heinemann Asia.

¹⁰Abraham, Collin. 2004. *The Naked Social Order; the roots of racial polarisation in Malaysia*. Subang Jaya: Pelanduk Publications

mencerminkan setidaknya adanya *'Sino-Malay friction'* terjadi. Kedua kutub memiliki persepsi yang sangat berbeda. Orang Cina diandaikan sebagai *xenophobic* dan *sinocentric*. Manakala struktur sosial dan keagamaan kaum Melayu tidak memungkinkan untuk persatuan etnik dan agama lain, kecuali Arab atau India Muslim (disebut *Mamak*) untuk berintegrasi dengan mereka. Perkawinan silang di antara kedua komunitas Melayu dan Cina yang diharapkan dapat memecah dinding perkauman jarang sekali terjadi. Bagaimanapun keretakan antara etnik masih terus mengancam. Silong¹¹ (2005) menyatakan bahwa pada peristiwa Kampung Medan, Selangor hari 12 Maret 2002 terjadi sebagai manifestasi ketegangan antara kaum Melayu dengan kaum India yang mengorbankan tujuh nyawa. Begitu juga insiden di kampung Rawa Pulau Pinang pada tahun 1997 dengan skala yang tidak begitu masif dan tanpa korban nyawa.

Masalah perpaduan bangsa adalah sangat penting. Masalah ini tidak hanya berdampak secara nasional namun juga melangkah menjadi masalah wilayah regional di

rantau Asia Tenggara dan Asia. Sehingga ke saat ini masih berlangsung pelarian modal (*capital flight*) yang mengiringi pasca tragedi Mei 1998 di Indonesia. Isu ini akhirnya terus berkembang menjadi masalah hubungan antara bangsa utamanya dalam hal kasus perjanjian ekstradisi dan perpindahan modal antara Indonesia dengan Singapura.

Negara harus mengambil tindakan dalam mengurus masalah persatuan kejiwaan ini sebagai asas dalam pembangunan kebangsaan. Demi memastikan masalah dan mengatur manajemen keberagaman, negara telah mendirikan sebuah lembaga khusus untuk menangani permasalahan hubungan etnik. Institusi ini dinamakan Lembaga Perpaduan Negara yang diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Pada tahun 2004, lembaga ini akhirnya dipindahkan ke bawah koordinasi Lembaga Perdana Menteri. Lembaga ini menjadi bertanggung jawab terhadap program skim Rukun Tetangga yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan antara etnik di peringkat komunitas.

Kajian-kajian tentang komunitas menyatakan bahwa organisasi-organisasi lokal yang keberadaannya tercipta dari masyarakat sipil atau masyarakat madani merupakan potensi yang kuat untuk mencegah

¹¹ Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

berbagai bentuk perpecahan yang berpotensi menciptakan konflik. Perubahan sosial yang terjadi melalui reformasi dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan peralihan kekuasaan. Keadaan kekosongan sosial yang terjadi ini mengundang potensi berlakunya konflik dalam komunitas yang mendapatkan kebebasan dari perjuangan reformasi.

Salah satu alternatif potensi terbesar dalam meredakan konflik melalui penciptaan hubungan dan harmoni antara etnik adalah pembangunan hubungan di peringkat kehiranan. Sementara itu di peringkat negara tidak terbangun hubungan yang erat antara warga di tingkat akar rumput (*grassroots*). Begitu juga di peringkat keluarga kurang memberikan pengaruh secara sosial yang bermakna. Ini merupakan perbincangan utama untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih sistematik dan serius tentang Rukun Tetangga sebagai persatuan masyarakat kehiranan di wilayah perkotaan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menilai secara deskriptif kesatuan Rukun Tetangga pasca tahun 2000 di wilayah perkotaan di dua lokasi. Lokasi pertama adalah Kota Alor Setar, Negeri Kedah Darul Aman di Malaysia. Lokasi ini di pilih karena diasumsikan mewakili karakteristik keragaman etnik. Alor Setar memiliki karakteristik

demografis urban Malaysia secara keseluruhan dengan dominasi populasi kaum Melayu. Populasi dominan pada peringkat selanjutnya adalah kaum Cina.

Penelitian di Indonesia dilakukan di Kota Padang. Kota yang merupakan sebuah kawasan yang memiliki mayoritas penduduk Minangkabau. Minangkabau diandai sebuah bangsa yang dengan meminjam konsep *canopy pluralism* berada pada puak Melayu¹². Kota ini memiliki komposisi penduduk Cina yang cukup signifikan. Kajian oleh Columbijn¹³ membuktikan bahwa Padang juga merupakan sebuah wilayah perkotaan yang berkembang cepat dan multikultural. Kota Padang juga mewakili wilayah yang pernah mengalami kerusuhan etnik pada beberapa masa yang lalu terutama pada masa peralihan kekuasaan politik Indonesia tahun 1997.

Pengambilan lokasi di dua kota ini dilakukan dengan pertimbangan karena program skim Rukun Tetangga di kedua negara ini merupakan kebijakan negara dan dikendalikan dengan satu model

¹²Kahn, Joel S. 2006. *Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World*. Singapore: Singapore University Press and ASAA.

¹³Columbijn, Freek. 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang, sejarah sebuah kota di Indonesia pada abad ke-20 dan penggunaan ruang kota*. Yogyakarta: Ombak

struktur dan budaya organisasi yang monolitik. Wilayah penelitian cukup mewakili ciri program di peringkat nasional. Namun pada dasarnya penelitian yang dilakukan adalah kajian kasus yang induktif dengan mengambil lokasi terbatas dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke dalam unit analisis yang lebih makro.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Model Organisasi Kejiranan

Dalam konteks pembahasan dalam kajian ini adalah menjadi pertanyaan penting bahwa apakah sebagai sebuah organisasi persatuan kejiranan atau dalam literatur dikenal dengan *neighborhood association*, Rukun Tetangga adalah persatuan bercirikan lokal yang pada level tertentu adalah sebuah bentuk nyata dari masyarakat sipil? Banyak kajian menyatakan bahwa masyarakat sipil meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, memberikan sumbangan kepada kesehatan dan keberlangsungan demokrasi, dan membuat negara menjadi lebih responsif dan efektif¹⁴.

¹⁴ Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae (ed). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing; Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Global Pustaka Utama.; Adi Suryadi Culla. 2002.

Organisasi seperti Rukun Tetangga sebagaimana halnya *lizhang*, *cunzhang*, *inzhang* di Taiwan, *Resident's committee* di Singapura, *chokai*, *jichikai*, *chonnakai* di Jepang, *jumin wiyuanhui* di China, *banshanghoe* di Korea Selatan dan *cam dan cu* atau *to dan pho* di Vietnam adalah organisasi yang memiliki keterlibatan populer namun pada masa yang sama juga mempunyai hubungan sebagai bagian dari negara untuk memikul multi tujuan dan tugas yang diberikannya¹⁵. Organisasi ini ditemui di banyak tempat di dunia. Jumlah yang cukup besar boleh ditemui di wilayah Asia.

Beberapa pihak yang mengambil pengertian masyarakat sipil secara sempit, meragukan tepatnya penggolongan organisasi ini sebagai sebuah masyarakat sipil. Menurut mereka masyarakat sipil haruslah bebas dari negara.

Masyarakat Madani: pemikiran, teori dan relevansinya dengan cita-cita reformasi. Jakarta: Rajawali Press; Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM; Docherty, Iain, Robangun Goodlad & Ronan Paddison. 2001. "Civic Culture, Community and Citizen Participation in Contrasting Neighbourhoods". *Urban Studies*, Vol. 38.

¹⁵ Jungmin Seo. 2002. *Bansanghoe (1976-present) and the Politics of Symbolism in Korea*. paper presented at Annual Meeting of the American Political Science Associations.

Eisenstadt, Carl Lande, Steffen Schmidt dan James Scott¹⁶ menyampaikan pemikiran bahwa organisasi yang berkaitan dengan negara menciptakan “*erzats involvement*” dari warga melalui cara-cara tekanan, hubungan *patron-client*, atau bahkan manipulasi. Partisipasi semacam ini tidak menciptakan modal sosial karena terjadi gangguan terhadap kebebasan arus informasi dan berlaku pembatasan perdebatan politik. Tanpa kebebasan sepenuhnya dari negara, kelompok komunitas tidaklah dapat secara sepenuhnya mengawasi dan membatasi kekuasaan negara.

Penelitian yang lebih dalam tentang keterlibatan negara dalam aktivitas komunitas mempunyai sumbu-bangan yang besar dalam memperkuat dan mempertajam organisasi kewargaan. Banyak sekali pemerintah lokal yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang melibatkan warga. Sebagai contoh, setelah terjadinya insiden 11 September 2001, persatuan kejurian *Neighborhood Watch* dilibatkan secara signifikan dan berkerjasama dengan

¹⁶ Dalam Read, Benjamin L & Robert Pekkanen. 2004. *Straddling State and Society: Challenges and Insights from Ambiguous Associations* paper in A Benjamin Shambaugh Memorial Conference Department fo Political Science University of Iowa

agensi penegakan hukum di Amerika Serikat untuk menjaga keamanan secara nasional.

Read dan Pekkanen menyebut organisasi ini sebagai *straddler groups*. Ini berarti bahwa organisasi berdiri dalam wilayah batas antara negara dengan masyarakat. Karena itu, organisasi ini tidak dapat dipetakan sebagai persatuan swadaya masyarakat. Namun juga tidak merupakan sebagian dari organisasi publik yang dimiliki oleh negara sepenuhnya. Organisasi seperti ini dapat ditemukan bukan saja di negara dengan sistem demokrasi tetapi juga authoritarian. Karena itu bentuknya memiliki rentangan keragaman yang sangat luas.

China Residents' Commitee adalah salah satu yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah negara China. Beberapa kajian menunjukkan bahwa organisasi ini berkembang menjadi alat represi oleh negara terhadap warganegara. Namun pada saat yang sama mereka juga terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan seperti program sosial bahkan pemberian derma dan bantuan. Organisasi lain menunjukkan otonomi yang cukup besar. Mayoritas dari organisasi kejurian di Jepang menunjukkan ikatan kedaerahan yang sangat kuat dan mampu berdiri secara mandiri. Mereka juga membantu melaksanakan pemungutan sumbang-

an, menyebarluaskan informasi dan tugas lain dari pemerintahan daerah. Jungmin Seo¹⁷ dalam penelitiannya di Korea menyimpulkan bahwa organisasi ini lahir sebagai sebuah latihan administratif bagi masyarakat dengan tujuan dasarnya adalah untuk membangun kesatuan nasional. Organisasi ini terbukti menunjukkan keberagaman fungsi yang cukup kaya dan sekaligus menampilkan peranan yang representatif dan baik.

Berdasarkan diskusi di atas, Rukun Tetangga dapat dipetakan secara teoritik. Pada prinsipnya setiap rumah tangga atau kepala keluarga (*households*) adalah anggota dari organisasi Rukun Tetangga. Walaupun dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yang diatur dalam sebuah undang-undang yang formal, persatuan kejranaan ini mengelola administrasi dan beberapa kepentingan komunitas. Penelitian yang dilakukan Dwiyanto¹⁸ di Indonesia mengidentifikasi urusan-urusan tersebut termasuk:

1. memelihara lingkungan yang sehat;
2. mencegah kriminalitas;

¹⁷ Dalam Read, Benjamin L & Robert Pekkanen. 2004. *Straddling State and Society: Challenges and Insights* from Ambiguous Associations paper in A Benjamin Shambaugh Memorial Conference Department fo Political Science University of Iowa.

¹⁸ Dwiyanto, Raphaella D. 2000. *Loc cit*.

3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;
4. menyelenggarakan aktivitas perkawinan dan kematian;
5. mengumpulkan iuran anggota dan lain-lain kewajiban masyarakat;
6. mengurus bantuan-bantuan untuk golongan miskin;
7. Menciptakan keharmonian dalam kejranaan;
8. Melakukan registrasi atau membuat catatan tentang para penghuni;
9. Mendukung pelaksanaan sensus dan membantu penyelenggaraan pilihan umum.

Rukun Tetangga berinteraksi secara vertikal dan horizontal dengan berbagai organisasi dalam wilayah dimaksud, seperti *arisan (rotating credit association)*, Pembangunan Kesejahteraan Keluarga/PKK (*family welfare group*), Karang Taruna (*youth association*), dan Posyandu (*community-based health care group*). Interaksi ini membentuk struktur tertentu dalam masyarakat di paras akar umbi.

Di antara kajian-kajian terdahulu tentang Rukun Tetangga di Indonesia dilakukan oleh Sullivan¹⁹. yang melaksanakan kajian di Kalasan

¹⁹ Sullivan, J.A. 1980. *Back Alley Neighborhood: Kampung as Urban Community in Yogyakarta*. Melbourne Centre of Southeast Asian Studies Monash University (Working Paper no. 18)

Jawa Tengah. Ia menemukan bahwa sejak awalnya Rukun Tetangga secara organisatoris berintegrasi secara vertikal dengan pemerintahan daerah. Kedudukan Rukun Tetangga terletak pada tingkatan terbawah sebagai unit terkecil dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Namun demikian, bagaimanapun kedua penulis tersebut memberikan penekanan kepada aspek semangat gotong royong dan kasusukarelawan (*mutual assistance*) sebagai inti kepada organisasi ini.

Sullivan menyimpulkan bahwa semangat gotong royong adalah produk dari penerapan kebijakan yang bercirikan “*top-down*” yang ditekankan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru. Sullivan lebih menekankan kepada aspek administratif Rukun Tetangga. Ini merupakan pembenaran dari kedudukan Rukun Tetangga sebagai sebuah “*straddler group*” dengan dimilikinya secara simultan sifat sebagai “*administrative body*” dan “*community-based*” sebagai kekuatan konseptual bagi perkembangan kajian.

Berbagai kajian tentang Rukun Tetangga juga dilakukan di Malaysia seperti yang dilakukan Alias Mohamad²⁰ Azman Amin Hassan²¹,

Mansor Mohd. Noor²², Azizoh²³, Omar Mohammad²⁴ dan Alagirisamy²⁵. Ada perkembangan yang cukup signifikan yang memperluas fungsi Rukun Tetangga dibandingkan dengan pada saat awal terbentuknya. Perkembangan terakhir melalui motto Rukun Tetangga Alaf 21 lebih menekankan kepada memperbaiki

Relations in a Multicultural Society. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM.

²¹ Azman Amin Hassan. 1995. *Pengurusan ke Arah Pemantapan Skim Rukun Tetangga*. Makalah dalam Seminar Kepemimpinan AJK Rukun Tetangga. Lembaga Perpaduan Negara Negeri Perak Darul Ridzuan.

²² Mansor Mohd. Noor. 2005. *Sejarah, Perubahan dan Cabaran Masa Depan Rukun Tetangga*. Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-Undang. University Utara Malaysia dan Lembaga Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Lembaga Perdana Menteri

²³ Muhamad Sukur B. Azizoh Azizam. 2000. *Respons Masyarakat Terhadap Rukun Tetangga: Suatu Kajian di Wilayah Rukun Tetangga Taman Satria dan Taman Teratai, Alor Setar, Kedah*. Tesis Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial, Sintok: SPS, UUM

²⁴ Omar Mohammad. 1979. *Rukun Tetangga: Peranan dan Fungsi*. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Lembaga Antropologi dan Sosiologi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

²⁵ Rathnasamy s/o Alagirisamy. 1986. *The Revised Rukun Tetangga Scheme: An Appraisal*, Unpublished Master of Public Administration Thesis, Universiti Malaya.

²⁰ Alias Mohamad. 2005. “Managing Rukun Tetangga in Multiracial Society”. In Abu Daud Silong (ed). *Readings on Ethnic*

kualitas hidup penghuni dan memberi ruang kepada berbagai upaya dan penciptaan kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak terbatas.

Dengan demikian Rukun Tetangga berubah dari sekedar fokus kepada aspek keamanan dan registrasi serta perpaduan kepada pemberdayaan komunitas. Pada perkembangan terbaru Rukun Tetangga juga diperkuat dengan adanya berbagai biro dan kelompok komunitas seperti Jiran Muda, Jiran Wanita, Jiran Emas dan Tunas Jiran dengan khalayak sasaran yang lebih spesifik.

2. Pengaruh Rukun Tetangga pada Hubungan Antara Etnik

Penelitian menunjukkan bahwa responden di Alor Setar mulai merasakan bahwa Rukun Tetangga adalah penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal. Sebanyak 78.8 persen etnik Melayu merasakan ini dan sedikit di bawahnya dengan 71.4 persen etnik Cina menyetujui pernyataan ini. Selaras dengan keadaan di atas, ternyata semangat kejiwaan di antara etnik di wilayah penelitian cukup terbangun melalui lembaga Rukun Tetangga. Manfaat ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada peningkatan rasa aman kepada penduduk. Meskipun Rukun Tetangga belum cukup menjadi mediator secara maksimal dalam menangani isu-isu

sosial di daerah ini. Tidak semua isu sosial cukup diatasi secara sepenuhnya melalui aktivitas dan jangkauan pengaruh Rukun Tetangga di wilayah penelitian.

Rukun Tetangga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, demikian pengakuan dari 52.8 persen responden. Dengan adanya berbagai bentuk manfaat dari Rukun Tetangga yang dirasakan warga, maka pada gilirannya dapat meningkatkan toleransi di antara warga. Sebanyak 60.6 persen responden menyetujui pernyataan di atas, meskipun jumlah etnik Melayu dengan 64.7 persen sedikit lebih tinggi dari pengakuan etnik Cina dengan 52.4 persen. Perbedaan perolehan ini menjadi tipis ketika kepada kedua kelompok diajukan pertanyaan tentang apakah Rukun Tetangga cukup melibatkan hubungan multi etnik di kalangan penduduk dimana 60 persen responden menyetujuinya.

Namun demikian kurang dari setengah responden melihat Rukun Tetangga bermanfaat untuk meningkatkan perasaan saling menerima perbedaan dengan proporsi 47.2 menyatakan setuju dan 8.7 persen membantahnya. Dirasakan angka 8.7 persen patut menjadi tumpuan perhatian. Masih ada ditemukan sebagian kecil dari warga yang merasakan adanya perbedaan antara etnik dalam komunitas mereka. Hal

ini sebenarnya bukanlah merupakan sebuah masalah yang wajar dalam pola kehidupan masyarakat yang majemuk. Jawaban responden menunjukkan bahwa keharmonisan hubungan antar etnik di wilayah penelitian tidak hanya dibangun melalui Rukun Tetangga. Masih ada organisasi lain yang lebih berperan dalam membangun keharmonisan hubungan antara etnik. Hampir 30 persen responden menyetujui pernyataan ini. Hanya 13.4 persen yang membantahnya.

Total 66.7 persen responden etnik Minang di Kota Padang menganggap Rukun Tetangga adalah institusi penting dalam kehidupan masyarakat di lokasi penelitian, bahkan 88.9 persen responden Cina bersetuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 57.1 persen responden merasakan bahwa Rukun Tetangga penting untuk meningkatkan semangat kejiwaan antara etnik di wilayah penelitian. Kaum Melayu memberikan jawaban membenarkan sepenuhnya sejumlah 60 persen dan etnik Cina sebesar 54.2 persen, terlihat adanya pola arah jawaban yang mirip di antara kedua kelompok.

Sejauh ini salah satu bentuk aktivitas Rukun Tetangga yang paling aktif adalah bidang keamanan. Ini menjelaskan mengapa sebanyak 68 persen responden Melayu dan 84.7 persen responden Cina merasakan

bahwa Rukun Tetangga penting untuk meningkatkan rasa keamanan kepada penduduk di wilayah mereka. Meskipun demikian kaum Cina lebih melihat Rukun Tetangga merupakan alternatif sebagai mediator dalam isu-isu dan masalah sosial di wilayah kejiwaan mereka. Sebanyak 76.4 persen diantara mereka memberikan persetujuan. Bandingkan dengan responden Melayu yang mencapai angka 32 persen. Ada kesan bahwa bagi orang Melayu, ada intitusi lain yang lebih berpotensi menjadi penengah isu-isu sosial.

Walaupun dapat dilihat adanya apresiasi kepada peranan Rukun Tetangga dengan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, namun hanya 36.1 persen dari jawaban setuju sepenuhnya. Sejumlah 53.7 persen menyetujui pernyataan ini secara sebagian. Kaum Cina lebih melihat hubungan timbal balik antara Rukun Tetangga dengan peningkatan keajahteraan ini pada angka 43.1 persen, sementara itu kaum Melayu hanya 29.3 persen.

Kedua kelompok etnik mengakui adanya partisipasi hubungan multi etnik di antara warga dalam aktivitas Rukun Tetangga. Sebanyak 41.3 persen kaum Melayu memberikan pengakuannya dan 43.1 persen bagi kaum Cina. 53.3 persen kaum Melayu menyimpulkan Rukun Tetangga bermanfaat untuk mening-

katkan rasa toleransi di antara penduduk. Responden etnik Cina memberikan jawaban yang lebih meyakinkan dengan capaian 81.9 persen mengakui hubungan kedua variabel tersebut. Pola jawaban yang sama juga terjadi pada pernyataan manfaat Rukun Tetangga untuk meningkatkan perasaan saling menerima perbedaan. Sebanyak 80.6 persen responden Cina setuju dan 41.3 persen bagi responden Melayu setuju tentang pernyataan di atas. Meskipun demikian, sebanyak 33.3 persen responden Melayu melihat ada organisasi lain yang lebih berperan dalam menjaga keharmonian antara etnik. Demikian pula halnya dengan 48.6 persen responden kaum Cina.

3. Taraf Keaktifan Rukun Tetangga di Alor Setar

Di seluruh kawasan penelitian baik di Rukun Tetangga aktif ataupun Rukun Tetangga kurang aktif, responden menyatakan bahwa Rukun Tetangga adalah penting bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu, Rukun Tetangga juga bermanfaat untuk membangun semangat kehiranan serta memberikan rasa aman di wilayah tersebut. Meskipun demikian, hanya di wilayah Rukun Tetangga aktif penduduk merasakan bahwa Rukun Tetangga telah memainkan peranan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah dan isu-isu sosial dalam wilayah tersebut. Sebanyak

55.6 persen responden Melayu dan 50,0 persen responden Cina merasakan ini. Fungsi Rukun Tetangga sebagai pusat komunitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih mendapatkan apresiasi di kalangan etnik Melayu dengan 55.6 persen dan 53.1 persen serta untuk etnik Cina 61.5 persen di wilayah aktif dan hanya 31.3 persen di wilayah kurang aktif.

Kaum Cina di wilayah Rukun Tetangga aktif merasakan bahwa aktivitas Rukun Tetangga berhasil meningkatkan perasaan saling menerima di antara penduduk. Jawaban yang lebih optimis tidak ditemukan di kalangan etnik Melayu di kedua jenis wilayah. Namun demikian dalam hal melibatkan hubungan multi etnik dan manfaat Rukun Tetangga dalam meningkatkan toleransi kedua-dua etnik sepakat. Data menunjukkan bahwa di samping Rukun Tetangga tidak ada organisasi lain yang lebih berperan dalam menjaga keharmonian hubungan antara etnik di wilayah lokasi penelitian. Kalaupun ada tidak mencapai taraf signifikansi yang menandingi Rukun Tetangga.

Dengan demikian dalam hal perasaan saling menerima perbedaan dan mediator isu-isu sosial, Rukun Tetangga yang aktif lebih baik dari Rukun Tetangga kurang aktif. Makna peranan Rukun Tetangga dalam menjaga keharmonisan antara etnik juga lebih baik di wilayah Rukun

Tetangga aktif jika dibandingkan dengan Rukun Tetangga yang kurang aktif. Ada kasus kesepakatan di antara responden penelitian bahwa Rukun Tetangga sebagai organisasi yang berperan dalam meningkatkan hubungan diantara etnik diakui secara penuh tanpa adanya perbedaan pola jawaban yang sangat bermakna untuk kasus di semua wilayah.

4. Taraf Keaktifan Rukun Tetangga di Kota Padang

Secara rerata, responden merasakan bahwa Rukun Tetangga adalah penting dalam kehidupan masyarakat, membangun semangat kejiwaan dan memberikan rasa aman di wilayah mereka tinggal. Penduduk etnik Cina lebih merasakan bahwa Rukun Tetangga telah memainkan peranan sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu sosial di wilayah tersebut. Sebanyak 88.2 persen etnik Cina di wilayah aktif dan 50.0 persen di wilayah kurang aktif bersetuju hal ini. Pola jawaban seperti ini tidak didapatkan pada responden etnik Melayu.

Secara umum, Rukun Tetangga belum melaksanakan fungsinya sebagai pusat komunitas untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Kaum Cina di wilayah kurang aktif mempunyai pendapat yang sama, namun tidak demikian dengan etnik Melayu dengan skor hanya 26.7

persen. Rukun Tetangga aktif lebih melibatkan hubungan multi etnik dengan 52.6 persen etnik Melayu dan 55.9 persen etnik Cina menyetujui. Dengan demikian Rukun Tetangga belum berhasil memberikan peningkatan kesejahteraan penduduk. Peranan ini merupakan bentuk yang lebih maju dan bermakna pada saat kondisi sosial kemasyarakatan sudah stabil dan memiliki struktur yang kokoh.

Pola yang sama juga ditemukan pada pengaruh Rukun Tetangga dalam meningkatkan rasa toleransi. Responden Rukun Tetangga di wilayah aktif lebih mengakui ini jika dibandingkan dengan Rukun Tetangga yang kurang aktif. Penduduk Cina dengan 88.2 persen di wilayah aktif dan 63.6 persen di wilayah Rukun Tetangga kurang aktif melihat aktivitas Rukun Tetangga meningkatkan perasaan saling menerima perbedaan di antara penduduk. Etnik Cina lebih memandang Rukun Tetangga menjadi mediator dalam isu-isu sosial, termasuk juga di wilayah Rukun Tetangga yang kurang aktif. Meskipun tidak mencapai angka yang signifikan, di wilayah Rukun Tetangga aktif dilihat keberadaan organisasi lain yang lebih berperan dalam menjaga keharmonian hubungan antara etnik di wilayah ini. Peranan organisasi lain ini tidak ditemukan di wilayah dimana Rukun Tetangga

kurang aktif. Dengan demikian kurang aktifnya Rukun Tetangga dalam menangani isu harmoni antara etnik di sini bukan disebabkan karena wujudnya organisasi lain yang lebih efektif.

Pergaulan lintas batas etnik di peringkat komunitas berlangsung dengan sangat baik. Responden merasa puas dengan kehidupan seharian di komunitas, kecuali warga etnik Cina yang tinggal di wilayah Rukun Tetangga kurang aktif. Konflik masa lalu mekipun terjadi di wilayah lain yang disebarkan oleh media tidak mempengaruhi kehidupan di kawasan penelitian. Semua etnik sepakat bahwa, seandainya ada, konflik yang ada tidak disebabkan karena perbedaan etnik.

Beberapa jawapan negatif yang didapatkan mengindikasikan bahwa pada kalangan responden etnik Cina di wilayah Rukun Tetangga yang kurang aktif hanya 42.3 persen dan mereka setuju bahwa aktivitas keagamaan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Hanya sebesar 15.4 persen menyatakan kedudukan ekonomi komunitas sudah baik dan hanya 46.2 persen yang setuju bahwa lingkungan tempat tinggal mereka sudah baik. Sementara itu jiran mereka dari etnik Melayu memberikan jawapan positif di atas 50 persen. Meskipun demikian ada kecenderungan dimana kesepakatan dari kedua etnik di semua Rukun Tetangga bahwa masih

didapati perbedaan taraf hidup yang cukup kentara antara si kaya dan si miskin di wilayah mereka tinggal. Peranan negara mendapatkan nilai positif dari semua wilayah responden. Negara dianggap sudah mendukung hubungan antara etnik, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menyediakan fasilitas umum dalam wilayah komunitas.

Peran komunitas mendapat tanggapan yang sangat baik dari responden untuk semua isu hubungan lintas batas sehari-hari. Penduduk merasa puas dengan kehidupan di kedua jenis wilayah. Tidak ditemukan adanya pengaruh konflik pada masa lalu. Sekiranya ada konflik yang terjadi tidak ada hubungannya dengan perbedaan etnik. Aktivitas keagamaan meningkat dan semua warga dapat menjalankan ibadah agama dengan bebas di wilayah itu. Hampir semua pertanyaan dijawab dengan komposisi jawapan di atas 50 persen. Perbedaan jawapan hanya didapati dalam pertanyaan tentang kedudukan ekonomi. Etnik Melayu di wilayah Rukun Tetangga aktif menjawab dengan rendah pada proporsi 32.4 persen. Namun pada Rukun Tetangga kurang aktif, etnik Cina-lah yang menjawab dengan skor serendah 36.4 persen. Pada rerata di peringkat kota, isu kedudukan ekonomi inilah yang mendapat tanggapan paling rendah.

Keamanan dan perdagangan di mata warga dinilai dengan cukup

baik. Etnik Melayu di Rukun Tetangga kurang aktif masih merasakan adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Penghargaan terhadap prestasi negara terlihat cukup baik, terutama dalam isu dukungan hubungan antara etnik dan kemudahan awam. Hanya 33.3 persen etnik Melayu di Rukun Tetangga aktif yang memberikan jawapan positif terhadap pernyataan negara telah memberikan perkhidmatan awam yang lebih baik. Ada kesan etnik Melayu lebih skeptis tentang pelayanan publik.

Analisis dan Pembahasan

1. Rukun Tetangga dan Masyarakat Sipil

Jika merujuk kepada pemahaman yang dikenal secara umum dalam ilmu sosial bahwa masyarakat sipil adalah institusi yang (1) berada di antara keluarga, di satu sisi dengan negara, dari sudut lain (2) menciptakan hubungan dan kaitan di antara individu dan keluarga, dan (3) bebas dari pengaruh negara, maka Rukun Tetangga adalah sebuah bentuk dari masyarakat sipil²⁶. Demikian juga jika pengertian

tersebut ditambahkan dengan dua syarat yaitu (1) ruang dan institusi sipil tersebut mengandung juga keperluan dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik, dan (2) insituti tersebut haruslah modern dan volutaristik, maka Rukun Tetangga memiliki semua ciri sebagai sebuah masyarakat sipil.

Temuan dalam penelitian di Malaysia dan Indonesia mendukung pernyataan itu. Melalui skim Rukun Tetangga sebagai kebijakan negara di kedua negara mengandung ciri-ciri masyarakat sipil, kecuali kaitannya dengan negara yang boleh diperdebatkan Perhubungan yang terjadi di antara warga mengandungi corak perhubungan lintas batas etnik (*interethnic atau cross-cutting social ties*) dalam beberapa aspek, yaitu:

- 1) Masyarakat dalam Rukun Tetangga memiliki taraf komunikasi yang sangat baik, dengan melaksanakan hubungan sehari-hari terutama yang berlangsung dengan sangat intensif seperti perilaku bertegur sapa, perayaan umum, undangan dalam aktivitas sosial, solidaritas dalam musibah, dan kesepakatan untuk membersihkan hubungan dan isu perkauman dari wacana politik.
- 2) Secara institusi kejiranan dilihat adanya kepuasan yang tinggi dalam kehidupan kejiranan dalam Rukun Tetangga. Dengan adanya

²⁶ Forrest, Ray & Ade Kearns. 2001. "Social Cohesion, Social Capital and the Neighborhood". *Urban Studies*, vol. 38, No. 12.

sensitivitas terhadap trauma konflik etnik warga sangat berhati-hati dalam isu ini, tidak ada diskriminasi antara etnik tetapi antara kelas sosial, suasana kehidupan keagamaan yang baik, baiknya lingkungan alam sekitar, baiknya keamanan, relatif baiknya pelayanan publik.

- 3) Pengurusan dalam bidang sosial seperti keagamaan, kematian, organisasi permodalan, organisasi NGO, organisasi kesenian, politik, serta olah raga.
- 4) Meskipun dibentuk berdasarkan skim kebijakan negara, namun penglibatan warga dalam organisasi dan aktivitas dalam Rukun Tetangga adalah sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan belum meningkatnya secara signifikan taraf penglibatan warga meskipun mereka merasakan bahwa Rukun Tetangga memberikan manfaat bagi mereka terutama dalam meningkatkan semangat kejiiran-an, toleransi, keamanan, walaupun belum banyak mempengaruhi menerima perbedaan dan peningkatan kesejahteraan.
- 5) Rukun Tetangga sudah dipolakan untuk dikelola dan diurus sesuai dengan konsep organisasi modern, meskipun memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pengurus Rukun Tetangga di Padang dilantik melalui sebuah pemilihan (*elected*) secara demokratis,

meskipun pengurus Rukun Tetangga yang berhasil cenderung dipilih kembali. Sudah ada pembagian kerja (*division of authority*) dalam Rukun Tetangga secara baik, dalam hal ketua, bendahara, sekretaris. Dalam hal pembagian pemegang tanggung jawab aktivitas, Rukun Tetangga di Kota Padang mempunyai hubungan kerja yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Seterusnya warga juga memiliki visi untuk memperkuat institusi melalui perancangan yang strategik, kerjasama organisasi, daya fleksibilitas, audit organisasi dan berbagai bentuk modernisasi organisasi di masa depan.

- 6) Rukun Tetangga menjadi institusi yang mengeratkan hubungan antara negara dengan masyarakat pada peringkat komunitas. Secara jelas ini dilihat dari fungsi awal Rukun Tetangga untuk mengajak warga untuk terlibat dalam menjaga keamanan di peringkat kejiiran-an mereka. Rukun Tetangga juga menjadi seperti radar untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan yang cukup penting dalam memberikan informasi tentang kebijakan negara kepada masyarakat serta memelihara terjaganya simbol-simbol dan etos bangsa di peringkat komunitas.

2. Potensi Komunitas Rukun Tetangga sebagai Pembangun Perdamaian

Rukun Tetangga memiliki potensi yang besar untuk membangun perdamaian antara etnik. Secara teoritik, dengan semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam Rukun Tetangga apatah lagi dengan peningkatan penglibatan antara etnik yang terjadi akan semakin meningkatkan rasa saling kenal, saling berhubungan dan solidaritas di antara warga. Dengan komunikasi yang terjadi di antara warga yang multi budaya maka perdamaian di peringkat komunitas akan berhasil. Komunikasi dan rasa saling memiliki ini menjadi penangkal bagi timbulnya berbagai isu sosial. Rasa aman juga tumbuh dengan keyakinan akan rasa saling menjaga di kejiranan. Varshney²⁷ menemukan bahwa pada masyarakat berorganisasi (*associational society*) yang aktif menjadi benteng pertahanan sosial yang ditunjukkan pada saat adanya potensi konflik di peringkat nasional.

Keberadaan Rukun Tetangga di wilayah urban menjadi institusi penting dalam diskusi terhadap

potensi ini. Secara sosiologis, wilayah perumahan kelas pekerja di wilayah perkotaan adalah terdiri dari pendatang-pendatang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Hampir semua warga adalah mereka yang datang dari berbagai wilayah daerah asal yang berbeda-beda. Gerakan urbanisasi membuat mereka meninggalkan solidaritas tradisional yang berasaskan primordialisme genealogis dan komunalisme di daerah asal mereka yang damai. Kehidupan perkotaan yang sukar dan kompetitif memerlukan tumbuhnya rasa komunalisme baru, melalui aktivitas dan hubungan kejranaan dalam Rukun Tetangga rasa ini tumbuh. Responden menyatakan bahwa ada berbagai impak Rukun Tetangga ditemukan pada kehidupan kejranaan dan harmonis antara etnik di wilayah kejranaan. Namun demikian, beberapa potensi yang belum cukup tergali dan dimanfaatkan dengan baik pada pelaksanaan skim Rukun Tetangga, baik di Alor Setar maupun di Kota Padang, yaitu:

- 1) Belum banyaknya interaksi budaya terjadi dalam beberapa aspek kebudayaan seperti kuliner, pembatasan ini terutama ditemukan pada responden Melayu;
- 2) Warga etnik Melayu kurang cukup memberikan penghargaan dan toleransi kepada agama dan perjalanan aktivitas keagamaan

²⁷Varshney, Ashutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civil Society: Northern Ireland, The USA, Malaysia, Sri Lanka, and Nigeria*. Project Report funded by the Ford Foundation

etnik lain, dengan demikian ini membuktikan bahwa agama menjadi batasan yang tidak boleh ditawarkan bagi etnik Melayu;

- 3) Belum banyaknya aktivitas kongsi ekonomi yang diinisiasi oleh Rukun Tetangga dan warga. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akan memberikan dampak domino kepada kemampuan ekonomi Rukun Tetangga dan pada akhirnya tercipta kemandirian dari peranan dan subsidi negara. Kurangnya kemandirian secara pengurusan dan administrasi merupakan salah satu kelemahan yang masih dimiliki Rukun Tetangga sehingga belum maksimum menjadi sebuah kekuatan masyarakat sipil;
- 4) Rukun Tetangga belum berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian dan masalah yang tumbuh pada kejranaan;
- 5) Belum adanya lintas batas etnik dalam hal beberapa aktivitas yang berpotensi seperti sukan. Hasil penelitian menemukan bahwa sukan masih merupakan wilayah yang sangat kental memiliki dimensi keetnikan dalam aktivitas Rukun Tetangga;
- 6) Dari seluruh wilayah Rukun Tetangga yang diteliti, hanya satu Rukun Tetangga yang memiliki pusat komunitas yang baik. Berdasarkan kajian secara pengamatan etnografis yang

dilakukan, pusat komunitas merupakan infrastruktur penting yang menjadikan aktivitas Rukun Tetangga menjadi semakin baik dan berfungsi untuk membangun semangat kejranaan dan perpaduan di antara warga.

- 7) Dengan membebaskan Rukun Tetangga dari pengaruh politik perkauman atau berasaskan agama, maka hubungan antara warga akan menjadi lebih kondusif dan harmoni. Meskipun demikian Rukun Tetangga tetap memiliki potensi dalam mengeratkan hubungan antara masyarakat dan negara.

Rukun Tetangga hanyalah sebuah organisasi kejranaan yang memiliki pengaruh dan *modularity* terbatas di wilayah kejranaan. Banyak sekali terbukti bahwa usaha positif yang dilakukan pada peringkat *grassroots* yang bermakna, pada akhirnya karena tidak didukung oleh kebijakan di peringkat negara atau pemerintah daerah menjadi kehilangan potensi yang dimiliki. Hal ini juga terbukti dalam beberapa kasus, isu-isu nasional dan global yang disampaikan melalui media dan desas-desus menjadi kendala bagi tumbuhnya inisiatif-inisiatif lokal dalam menciptakan perdamaian antara etnik. Pada peringkat tertentu, taraf kedewasaan dan daya tahan komunitas mendapatkan ujian dan tantangan pada proses ini.

Berdasarkan temuan atau pembahasan dalam artikel ini terdapat beberapa sumbangan yang diberikan kepada teori dan konsep tentang administrasi negara dan kajian ilmu sosial. Penelitian yang bersifat eksploratori dan bukan eksplanatori dengan mengambil posisi pada konteks mikro dan tidak bermaksud untuk mengangkat analisis kepada peringkat makro. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan tiga macam konsep dalam mengungkapkan fakta dan pemikiran terhadap potensi organisasi kemasyarakatan di peringkat kehiranan dalam menciptakan hubungan antara etnik yang damai. Ketiga konsep tersebut yaitu: (1) pergaulan antara etnik (*cross cutting social ties atau interethnic forms of engagement*) baik berupa insitusi (*organized*) maupun sehari-hari (*quotidian*); (2) batas etnik (*ethnic boundaries*) ketika pilihan keetnikan berhadapan dengan material, status dan ikatan sosial sebagai konsep yang dikembangkan Barth (1971), Banton (1997), dan Mansor (1999)²⁸; dan (3)

²⁸ Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press; Banton, Michael. 1997. *Ethnic and Racial Consciousness*. 2nd edition. London: Addison Wesley Longman Limited; Mansor Mohd. Noor. 1999. *Crossing Ethnic Borders in Malaysia: measuring the fluidity of ethnic identity and group formation*. *Akademika* 55 Julai 1999

persatuan kehiranan (*neighborhood associations*) sebagai modal sosial dalam pembangunan bangsa.

Cross-cutting social ties atau hubungan lintas batas sosial antar etnik pada umumnya memiliki potensi untuk membangun keharmonian melalui semangat kebersamaan. Varshney²⁹ berhujah hubungan ini boleh dilakukan sama ada melalui institusi atau asosiasi atau dalam bentuk lain seperti interaksi rutin dalam kehidupan harian seperti berkunjung ke tetangga, mengundang kenduri dan lain-lain. Penelitian mendapati bahwa dalam konteks Malaysia dan Indonesia hubungan ini menemui kendala dalam aspek aktivitas yang bersifat keagamaan.

Meskipun adanya komunikasi dan sikap saling menghargai dalam kehidupan keagamaan terutamanya dalam komunitas Cina, tetapi sangat sukar bagi komunitas Melayu yang beragama Islam. Nampaknya perilaku keagamaan yang tidak cukup pluralis meskipun juga tidak boleh disebut fundamentalis dan radikal menjadi kendala. Disadari ada wilayah-wilayah tertentu dalam kehidupan keagamaan yang sukar untuk ditawarkan. Dengan demikian, pada peringkat tertentu temuan penelitian di India, dalam kasus kerusuhan antara agama, memiliki potensi untuk terjadi di

²⁹ Varshney, Ashutosh. 2002, *Loc cit*.

lingkungan di Asia Tenggara. Namun demikian hasil penelitian tidaklah bermaksud untuk menggunakan logika inferensial untuk mengambil kesimpulan yang lebih general dari objek yang diselidiki, namun hanya untuk mencari pola kecenderungan yang terjadi dengan pendekatan induktif.

Pada dasarnya *Rukun Tetangga* adalah digolongkan sebagai sebuah persatuan kejrangan. Secara konseptual organisasi yang dibentuk oleh pemerintah negara yang pada prinsipnya adalah menggunakan pendekatan *top-down* diragukan untuk memiliki fungsi sebagai masyarakat sipil yang demokratis dan efektif, sehingga pengurusan organisasi kejrangan haruslah berakar dari bawah untuk menangkap kehidupan budaya persatuan yang spesifik. Namun secara induktif Rukun Tetangga yang terbukti menjadi sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai sebuah bagian dari kebijakan negara tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi bebas tidak memihak dan diikuti secara sukarela meskipun masih memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan sarana ini dapat diwujudkan sebuah corak hubungan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

V. PENUTUP

Tidak ada sebuah model yang mapan untuk menjadi yang terbaik dalam

organisasi kejrangan. Namun demikian, yang lebih penting adalah model yang sesuai dengan struktur persatuan atau komunitas yang terlibat. Untuk keadaan di Indonesia dan Malaysia, pada peringkat tertentu model Rukun Tetangga dianggap sesuai dan memerlukan pengembangan lebih jauh di masa depan. Dengan demikian konsep masyarakat sipil versi Barat yang berasaskan ideologi individualisme hanya dapat diambil dan disalin pada masyarakat timur pada batas-batas tertentu. Diperlukan sebuah kajian yang lebih mendasar (*grounded research*) dan falsafah tentang rumusan ini. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sipil sebagai sebuah *construct* tidak harus terpisah secara ekstrim dari negara dan tetap memiliki kemampuan dan potensi modal sosial untuk mengukuhkan dan memperkuat komunitas.

Pencapaian penglibatan sosial sebagai prasyarat demokrasi tidak selalu harus berbentuk *bottom up* menuju struktur yang lebih tinggi di peringkat negara. Hal ini akan lebih sukar pada saat nilai-nilai individualisme, inklusivisme dan penderewasaan sosial belum dimiliki oleh masyarakat. Melalui Rukun Tetangga sebagai organisasi kejrangan yang didirikan oleh negara terlihat bahwa peranan negara boleh menjadi pemancing atau menjadi modal awal bagi proses demokrasi dan peng-

libatan yang lebih substansial dengan pengembangan lebih lanjut dari komunitas. Kemajemukan dalam aspek etnik sebagaimana juga agama dan gender dapat dapat menjadi kekuatan pendorong menuju penglibatan publik dan demokrasi. Masyarakat plural seperti juga dengan

masyarakat multikultural memiliki potensi dalam mengembangkan masyarakat sipil dan menjadi modal sosial dalam usaha penciptaan demokrasi, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa (*nation building*).

KAJIAN KEPUSTAKAAN

- Abraham, Collin. 2004. *The Naked Social Order; the roots of racial polarisation in Malaysia*. Subang Jaya: Pelanduk Publications
- Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
- Adi Suryadi Culla. 2002. *Masyarakat Madani: pemikiran, teori dan relevansinya dengan cita-cita reformasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Alias Mohamad. 2005. "Managing Rukun Tetangga in Multiracial Society". In Abu Daud Silong (ed). *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
- Alo Liliweri. 2005. *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKSI
- Azman Amin Hassan. 1995. *Pengurusan ke Arah Pemantapan Skim Rukun Tetangga*. Makalah dalam Seminar Kepemimpinan AJK Rukun Tetangga. Lembaga Perpaduan Negara Negeri Perak Darul Ridzuan.
- Banton, Michael. 1997. *Ethnic and Racial Consciousness*. 2nd edition. London: Addison Wesley Longman Limited.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Columbijn, Freek. 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang, sejarah sebuah kota di Indonesia pada abad ke-20 dan penggunaan ruang kota*. Yogyakarta: Ombak
- Comber, Leon. 1983. *13 May 1969: A Historical Survey fo Sino-Malay Relations*. Kuala Lumpur: Heinemann Asia

- Docherty, Iain, Robangun Goodlad & Ronan Paddison. 2001. "Civic Culture, Community and Citizen Participation in Contrasting Neighbourhoods". *Urban Studies*, Vol. 38
- Dwiyanto, Raphaella D. 2000. *The Existing Form of Urban Locality Groups in Jakarta: Reexamining the RT/RW in the post-New Order Era*. Atmajaya Catholic University Indonesia
- Forrest, Ray & Ade Kearns. 2001. "Social Cohesion, Social Capital and the Neighborhood". *Urban Studies*, vol. 38, No. 12
- Galster. C. 2001. "On the Nature of Neighborhood". *Urban Studies*. volume 38: 12. page 2111-2124.
- Jungmin Seo. 2002. *Bansanghoe (1976-present) and the Politics of Symbolism in Korea*. paper presented at Annual Meeting of the American Political Science Associations
- Kahn, Joel S. 2006. *Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World*. Singapore: Singapore University Press and ASAA
- Kristof, Nicholas D. 1998. In Indonesia, New Freedom Feeds Ethnic Friction, *New York Times*, May 25, 1998
- Leo Suryadinata. 2003. "Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran negara, sejarah dan budaya dalam hubungan antaretnis". *Antropologi Indonesia tahun xxvii no. 71*, Mei Agustus 2003.
- Mansor Mohd. Noor. 1999. *Crossing Ethnic Borders in Malaysia: measuring the fluidity of ethnic identity and group formation*. *Akademika* 55 Juli 1999
- _____. 2005. *Sejarah, Perubahan dan Cabaran Masa Depan Rukun Tetangga*. Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-Undang. University Utara Malaysia dan Lembaga Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Lembaga Perdana Menteri
- Masyhuri. 2006. *Bakar Pecinan Konflik Pribumi vs Cina di Kudus tahun 1918*. Jakarta: Pensil-234
- Muhamad Sukur B. Azizoh Azizam. 2000. *Respons Masyarakat Terhadap Rukun Tetangga: Suatu Kajian di Wilayah Rukun Tetangga Taman Satria dan Taman Teratai, Alor Setar, Kedah*. Tesis Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial, Sintok: SPS, UUM
- Nurhadiantomo. 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pro-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Omar Mohammad. 1979. *Rukun Tetangga: Peranan dan Fungsi*. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Lembaga Antropologi dan Sosiologi: Universiti Kebangsaan Malaysia
- Rathnasamy s/o Alagirisamy. 1986. *The Revised Rukun Tetangga Scheme: An Appraisal*, Unpublished Master of Public Administration Thesis, Universiti Malaya.
- Read, Benjamin L & Robert Pekkanen. 2004. *Straddling State and Society: Challenges and Insights* from Ambiguous Associations paper in A Benjamin Shambaugh Memorial Conference Department fo Political Science University of Iowa
- Shamsul Amri Baharuddin. 2005. "Making Sense of National Unity in Malaysia: 'Break-down' versus 'break out' Perspectives". In Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Global Pustaka Utama.
- Sullivan, J.A. 1980. *Back Alley Neighborhood: Kampung as Urban Community in Yogyakarta*. Melbourne Centre of Southeast Asian Studies Monash University (Working Paper no. 18)
- Varshney, Ashutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civil Society: Northern Ireland, The USA, Malaysia, Sri Lanka, and Nigeria*. Project Report funded by the Ford Foundation
- Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae (ed). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing
- Yahya Ibrahim. 1995. *Pemandaran dan Kejiranan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.